

DAMPAK MIGRASI DI AUSTRALIA TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK

Oleh:
Agus Budiman¹

ABSTRAK

Australia mempunyai proses perjalanan sejarah yang panjang, sejak migrasi pertama yakni sejak kedatangan bangsa aborigni yang disebut sebagai penduduk asli (native people), sampai kedatangan bangsa-bangsa eropa dan bangsa-bangsa di dunia ke daratan ini pada gelombang migrasi kedua dan ketiga. Australia menjadi pertemuan berbagai bangsa di dunia, menjadikan Australia majemuk, yang menyebabkan Australia menjadi bangsa yang harus terbuka dalam melihat perbedaan yang ada dan menjadikan masyarakat Australia sebagai masyarakat Cosmopolitan. Masyarakat Cosmopolitan sejalan dengan agenda dalam menciptakan kehidupan Australia yang demokratis baik dalam hal politik dan hubungan masyarakatnya. Dimana nilai-nilai pluralisme perlu dipupuk guna menciptakan keharmonisan dalam hubungan masyarakat dari berbagai bangsa di Australia. Kemajemukan juga bisa dilihat dari sstem pemerintahan dan lahirnya partai-partai di Australia, yang menyuarakan berbagai kepentingan baik berdasarkan kepentingan ekonomi seperti partai liberal, buruh, dan petani, atau juga partai yang mengusung kebangsaan sebagai bentuk emansipasi posisi mereka di masyarakat seperti partai dari suku aborigni yang merasa termarginalkan dalam pergaulan politik dan sosial, begitu pun partai agama, dan partai lingkungan yang menambah semarak interaksi antar golongan di Australia.

Kata Kunci: *Migrasi dan Stabilitas Ketahanan*

ABSTRACT

Australia has a long history process, since the first migration since the arrival of the aborigi called as a native (native people), until the arrival of European nations and the nations of the world to this continent in the second and third wave of migration. Australia became the meetings of the various nations of the world, making Australia compound, which led Australia into a nation that should be open to see the differences and make the Australian public as Cosmopolitan society. Cosmopolitan society in line with the agenda in Australia menciptakan democratic life both in terms of political and community connections. Where the values of pluralism need to be cultivated in order to create harmony in the relationship people of all nationalities in Australia. Pluralism can also be seen from Sstem government and the birth of political parties in Australia, voicing the interests both based on economic interests such as the liberal party, workers, and farmers, or also the party that carries nationality as a form of emancipation of their position in society as the party of aborigines who feel marginalized in the political and social relationships, so anything religious party, and the party environment that add a lively interaction between groups in Australia.

Keywords: *Migration and Stability resilience*

PENDAHULUAN

Orang-orang Australia berasal dari seratus lebih negara yang berbeda-beda. Ada banyak bangsa dan kebudayaan di Australia. Manusia menghuni Australia sudah sejak lama sekali. Penghuni asli Australia disebut orang Aborijin.

Dalam bahasa Latin kata ‘aborigine’ mempunyai arti ‘dari awal mula’. Umumnya orang percaya bahwa mereka telah tinggal di Australia setidaknya selama 60.000 tahun. Beberapa bukti ilmiah terbaru menunjukkan bahwa manusia telah menghuni Australia lebih dari 60.000 tahun yang lalu.

Jurnal Artefak Vol. 3 No. 2 – Agustus 2015 [ISSN: 2355-5726]

Hlm: 187 - 194

¹ Dosen Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis

Sesudah Perang Dunia II terjadi arus perpindahan penduduk ke Australia dari banyak negara. Antara tahun 1950 dan tahun 1973 kebanyakan migran datang dari Eropa. Sejak saat itu, terdapat kenaikan arus migrasi dari Timur Tengah dan dari Asia.

Masyarakat Australia sekarang pada dasarnya adalah hasil dari proses pencampuran imigran yang memasuki Australia dalam tiga gelombang utama. Kondisi masyarakat sebagai melting pot itu tentu akan berpengaruh juga terhadap aspek kehidupan bangsa Australia.

PEMBAHASAN

Migrasi Di Australia

Crawford (1971) dalam salah satu karyanya menyatakan bahwa ada tiga gelombang migrasi utama yang pengaruhnya tampak dan terasa dalam masyarakat Australia.

Gelombang pertama adalah migrasi penduduk asli. Penduduk asli Australia yang dikenal sebagai kaum Aborigin Australia, memiliki sejarah budaya yang terpanjang di dunia, sejak zaman Es yang terakhir. Meskipun misteri dan perdebatan mengaburkan banyak aspek dalam prasejarah Australia, secara umum diakui bahwa manusia pertama berkelana melintasi lautan dari Indonesia sekitar 70.000 tahun yang lalu. Migrasi oleh masyarakat yang kemudian dikenal dengan penduduk asli. Diperkirakan sudah bermigrasi paling sedikit 30.000 tahun sebelum kedatangan orang-orang Eropa. Dari salah satu sumber yang kami dapat (peta terlampir) bahwa penduduk asli Australia berasal dari daratan Afrika melewati Asia Tenggara, termasuk kepulauan Indonesia, hingga tiba di daratan Australia. Corak kehidupan penduduk pada migrasi pertama ini masih dalam taraf berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering).

Gelombang migrasi kedua ditandai dengan tibanya rombongan pertama Inggris di Port Jackson, Australia pada tahun 1788. Awal migrasi ditandai dengan pengiriman narapidana Inggris ke Australia. Pada saat pengiriman narapidana Inggris ke Australia komposisi narapidana laki-laki mencapai 80%. Petugas keamanan yang berada di Australia pun tidak bersama keluarganya. Akibatnya pertumbuhan penduduk secara alami terhambat. Hal inilah yang kemudian mengakibatkan terhambatnya pembangunan.

Gelombang migrasi kedua juga ditandai dengan peristiwa Gold Rush yang terjadi sekitar

tahun 1850-an. Gold Rush merupakan peristiwa penemuan emas di New South Wales dan Victoria yang kemudian menimbulkan arus imigran yang sangat besar, terutama imigran yang berasal dari Cina. Sebelum ditemukannya emas, sudah ada imigran non Eropa di Australia. Mereka berasal dari India dan Cina yang dibawa pemerintah untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Setelah ditemukannya emas, arus imigran dari Cina meledak. Arus imigran ini melahirkan rasa takut dan cemburu di kalangan penggali-penggali emas kulit putih yang akhirnya mendorong terjadinya kerusuhan rasial. Untuk membatasi masuknya imigran dari kalangan kulit berwarna, maka pemerintah membuat undang-undang yang terkenal dengan nama Immigration Restriction Act. Maksud dari undang-undang ini adalah untuk mencegah masuknya imigran non kulit putih.

Selain itu juga sekitar pada abad ke 19, dengan penduduk yang padat, di Inggris banyak terjadi berbagai masalah sosial. Untuk mengurangi kepadatan penduduk dan juga untuk mengatasi berbagai masalah sosial, maka pemerintah memindahkan penduduk Inggris ke Australia. Hal ini juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan koloni.

Migrasi ketiga dimulai pasca perang dunia kedua. Pada masa ini terjadi pergolakan di wilayah Eropa. Pasca perang dunia kedua, banyak penduduk yang tinggal di camp pengungsi. Namun lama-kelamaan camp pengungsi menjadi penuh. Sementara di Australia sendiri banyak Industri yang telah berkembang, namun pada saat itu penduduk Australia sedikit dan sangat kekurangan tenaga terampil. Melihat keadaan Eropa yang seperti itu, pemerintah Australia kemudian mengakomodasikan penduduk Eropa untuk bermigrasi ke Australia.

Dampak Migrasi Di Australia

Dampak dari gelombang migrasi yang terjadi di Australia adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat Australia menjadi masyarakat yang multicultural karena orang-orang yang bermigrasi ke Australia tidak hanya dari Inggris ataupun dari daratan Eropa saja, tetapi ada juga migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Asia seperti India dan Cina.
- 2) Masyarakat Australia menjadi masyarakat yang cosmopolitan, yakni Australia adalah pertemuan masyarakat dari berbagai bangsa di dunia.

DAMPAK MIGRASI DI AUSTRALIA
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK
Agus Budiman

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan Australia merupakan sistem yang kompleks. Dimana lembaga-lembaga pentingnya merupakan paduan elemen-elemen tradisi dan model pemerintahan Inggris dan Amerika Serikat seperti Sistem penyelenggaraan pemerintahan Inggris dengan Majelis Perwakilan Rendah, praktek pemerintahan Amerika Serikat dengan senat federal. Undang-Undang Dasar Australia berisi ciri-ciri penting sistem pemerintahan Australia. Pembagian kekuasaan antara Negara Bagian dan Commonwealth (Persemakmuran), Gubernur Jendral mewakili Ratu Inggris. Terdapat Tiga Cabang Pemerintahan di Australia, yakni Cabang Legislatif (Parlemen - Senat dan Majelis Perwakilan Rendah); Eksekutif (Kementerian dan Pejabat Pemerintah); dan Cabang Yudikatif (sistem peradilan hukum).

Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif, sementara badan yudikatif memastikan berfungsinya pengadilan, dan pengangkatan serta pemberhentian hakim. Fungsi pengadilan ialah menafsirkan semua hukum, termasuk di antaranya Konstitusi Australia, dan menegakkan supremasi hukum. Konstitusi hanya boleh diubah melalui jajak pendapat.

Australia dikenal sebagai negara Monarki Konstitusional. Ini berarti Australia adalah negara yang mempunyai raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi atau UUD. Kepala negara Australia ialah Ratu Elizabeth II. Meskipun ia juga adalah Ratu Inggris, jabatan ini sedikit terpisah, baik dalam hukum maupun praktek pemerintahan atau konstitusional. Dalam kenyataannya, Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam sistem politik Australia dan hanya berfungsi sebagai simbol atau hanya sebagai publik figur untuk memobilisasi masyarakat. Di Australia Ratu secara resmi diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal yang diangkat oleh Ratu atas usulan Perdana Menteri Australia. Ratu tidak mempunyai peranan apapun dalam tugas keseharian Gubernur Jenderal.

Gubernur Jenderal adalah wakil Ratu Inggris di Australia. Posisinya tidak harus mengikuti arahan, pengawasan ataupun hak veto dari Ratu dan Pemerintah Inggris. Dalam Undang-Undang Dasar atau Konstitusi terdapat

wewenang dan tugas Gubernur Jenderal termasuk memanggil, menghentikan sidang badan pembuat undang-undang, dan membubarkan parlemen. Selain itu, Gubernur juga bisa menyetujui rancangan peraturan, mengangkat menteri, menetapkan departemen-departemen dalam pemerintahan, serta mengangkat hakim. Namun, berdasarkan konvensi, Gubernur Jenderal hanya bertindak atas permintaan para Menteri dalam hampir semua permasalahan. Figur yang diangkat untuk posisi Gubernur jenderal dipilih berdasarkan pertimbangan Pemerintah. Semua Gubernur negara bagian melaksanakan peran yang sama di wilayah mereka masing-masing.

1) Pemerintah Lokal

Terdapat sekitar 900 badan pemerintah lokal di Australia. Wewenang pemerintah lokal berbeda untuk setiap negara bagian dan merupakan tanggung jawab pemerintah negara bagian masing-masing. Beberapa badan pemerintah lokal bertanggungjawab menjalankan perusahaan perhubungan/transportasi dan energi. Negara-negara bagian menetapkan besar tarif pajak dan menerima pemasukan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Pemerintah lokal secara khusus ditugaskan untuk menangani perencanaan atau tata daerah, pengawasan izin bangunan, sarana jalan setempat, penyediaan air bersih, saluran pembuangan, pelayanan sampah dan kebersihan serta fasilitas hiburan masyarakat.

2) Pemerintahan Persemakmuran / Federasi atau Pemerintah Pusat

Parlemen tingkat pusat bersifat bikameral, yakni mempunyai dua kamar yaitu House of Representatives atau Majelis Rendah/DPR dan Senat atau Majelis Tinggi. Keduanya bertanggungjawab menetapkan UU berskala nasional seperti perdagangan, perpajakan, imigrasi, kewarganegaraan, jaminan sosial, kerjasama industri dan hubungan luar negeri. Rancangan UU/Peraturan Pemerintah harus disahkan oleh kedua majelis sebelum sebelum menjadi UU/Peraturan Pemerintah. DPR/House of Representatives mengusulkan sebagian besar rancangan UU/Peraturan Pemerintah. Majelis ini beranggotakan 148 anggota yang dipilih melalui pemilu, di mana setiap anggota mewakili sekitar 80.000 suara. Partai politik yang mempunyai kursi terbanyak di majelis rendah berhak membentuk pemerintahan.

Tanggung jawab pemerintah federal ini antara lain adalah di bidang:

- a) Pertahanan
- b) Perpajakan
- c) Urusan Luar Negeri
- d) Perdagangan Luar Negeri
- e) Komunikasi
- f) Transportasi
- g) Pendidikan
- h) Pembangunan

3) Pemerintah Negara Bagian dan Teritori

Hal-hal yang tidak diatur oleh Pemerintah Federasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Negara Bagian dan Teritori. Setiap negara bagian dan teritori mempunyai parlemen dan peraturan perundang-undangan (akta parlemen) sendiri (yang dapat diamandemen parlemen setempat) tetapi mereka juga tetap terikat konstitusi negara. (ciri dari bentuk federasi dan state)

Bilamana suatu UU/Peraturan Negara Bagian masih berada di bawah wewenang konstitusional Federasi, maka UU/Peraturan Pemerintah Federasi berlaku di atas wewenang UU/Peraturan negara bagian. Semua Parlemen negara bagian kecuali Queensland, bersifat bikameral yakni mempunyai majelis rendah dan majelis tinggi. Sementara parlemen dari dua teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) hanya memiliki satu majelis. Pemerintah negara bagian dan teritori menangani masalah kesehatan masyarakat, pendidikan, sarana jalan, pemanfaatan lahan publik, perangkat kepolisian, pemadam kebakaran dan pelayanan ambulans, serta keberadaan pemerintah lokal dalam wilayahnya masing-masing.

Tanggung jawab pemerintah negara bagian (state) adalah antara lain di bidang:

- a) Pendidikan
- b) Pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat
- c) Pembangunan
- d) Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup
- e) Jasa
- f) Perumahan Rakyat
- g) Kesehatan
- h) Transportasi lokal

4) Hubungan antara Pemerintahan Federal dan Negara Bagian

Pemerintah Federasi dan negara bagian menjalin kerjasama di berbagai bidang, yang secara resmi merupakan tanggung jawab negara bagian dan teritori; seperti pendidikan,

perhubungan, kesehatan dan penegakan hukum. Mengenai Pajak pendapatan, hal itu ditarik secara federal dan menimbulkan pendapat yang berbeda di antara semua tingkat pemerintahan negara bagian mengenai akses mendapatkan pemasukan merupakan ciri lama politik Australia.

Partai Politik

Partai Politik adalah pusat untuk memahami bagaimana politik Australia bekerja. Pihak mendominasi parlemen negara bagian dan federal, menyediakan semua pemerintah dan oposisi, dan frame sifat perdebatan politik. Di Australia terdapat beberapa partai politik, diantaranya partai Partai Buruh Australia, Partai Liberal, The Nationals, Australia Demokrat, Greens Australia, dan Partai Politik Lain.

Partai Buruh Australia atau ALP adalah yang tertua di Australia partai politik, yang dibentuk pada tahun 1890. Satu-satunya partai telah terus terwakili di dalam Dewan Perwakilan Rakyat sejak 1901, ini mengalami tiga melemahkan perpecahan di abad keduapuluh dan federal telah memerintah selama kira-kira sepertiga dari tahun-tahun sejak federasi, yang paling baru antara 1983-96, di bawah Bob Hawke dan Paul Keating.

Partai Liberal, awalnya terbentuk dari penggabungan dari Proteksionis dan Perdagangan Bebas pihak pada tahun 1910, Partai Liberal telah mengalami beberapa reformasi, yang berpuncak pada saat ini partai yang dibentuk oleh pendiri ikonik, Robert Menzies. Menzies memerintah selama 16 tahun dari tahun 1949 dan adalah Australia yang paling lama menjabat perdana menteri. Partai Liberal telah diatur dalam koalisi dengan Partai Nasional selama 36 dari 52 tahun terakhir.

The Nationals, awalnya dikenal sebagai Country Partai, telah diadakan kursi di parlemen federal sejak 1919. Mengubah nama menjadi Partai Negara Nasional di tahun 1970-an, lalu ke Partai Nasional pada 1980-an, dan akhirnya ke The Nationals pada tahun 2003, partai berbasis pedesaan telah melihat penurunan yang stabil dalam basis dukungan pemilih. Sementara masih memegang keseimbangan kekuasaan di Dewan Perwakilan Rakyat dan memerintah dalam koalisi dengan Partai Liberal, itu telah berjuang melawan munculnya One Nation, pedesaan Partai Liberal independen dan kompetisi.

Australia Demokrat, dibentuk pada tahun 1977 oleh yang tidak puas Liberal, Don Chipp,

DAMPAK MIGRASI DI AUSTRALIA
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK
Agus Budiman

Demokrat Australia yang paling sukses kecil partai politik dalam sejarah Australia. Meskipun tidak pernah memenangkan kursi DPR, sejak tahun 1981 telah diadakan atau berbagi keseimbangan kekuasaan di Senat. Ini adalah satu-satunya partai untuk tidak dipilih satu, tetapi lima perempuan sebagai pemimpin. Baru-baru ini, partai mengalami perpecahan internal yang melemahkan, keberangkatan dari kepemimpinan Natasha Stott Despoja dan jatuh peringkat jajak pendapat. Masa depan yang bermasalah.

Greens Australia, dibentuk oleh kandidat Partai Liberal disendorses, Pauline Hanson, pada tahun 1996, Satu Bangsa naik menjadi terkenal di Queensland di pemilihan negara bagian tahun 1998 ketika memenangkan 11 kursi di parlemen. Hal ini diikuti dengan memenangkan kursi Senat yang Queensland pada tahun 1998 dan pemungutan suara 8,43% dari suara utama di Dewan Perwakilan Rakyat, menjadikannya partai terbesar ketiga dalam hal dukungan pemilih pada saat itu. Partai cepat-cepat pergi ke tengah penurunan pertikaian internal, kehilangan perwakilan parlemen di Queensland, dan menghadapi pengadilan yang sedang berlangsung pertempuran selama pemilihan pendanaan. Partai itu disalurkan pada tahun 2001, pemungutan suara 4,35% dari suara utama, banyak pendukungnya kembali ke partai-partai koalisi. Selain partai-partai diatas, terdapat beragam partai politik kecil di Australia, mulai dari kelompok-kelompok agama yang konservatif untuk pinggiran organisasi anarkis.

Dari hal tersebut dapat menarik analisis jika masyarakat Australia menjadi masyarakat yang cosmopolitan karena proses perjalanan sejarah yang panjang, sejak migrasi pertama yakni sejak kedatangan bangsa aborigi yang disebut sebagai penduduk asli (*native people*), sampai kedatangan bangsa-bangsa eropa dan bangsa-bangsa di dunia ke daratan ini pada gelombang migrasi kedua dan ketiga.

Australia menjadi pertemuan berbagai bangsa di dunia, menjadikan Australia majemuk, yang menyebabkan Australia menjadi bangsa yang harus terbuka dalam melihat perbedaan yang ada. Kita bisa melihat dinamika Australia, dari pandangan mereka yang semula sangat tertutup yang hanya menghususkan tanah Australia hanya untuk bangsa kulit putih, sampai akhirnya Australia terbuka untuk berbagai bangsa di dunia.

Begitupun dengan dinamika politik yang ada, terbentuknya Commonwealth di Australia tak lepas dari ketergantungan setiap koloni di Australia untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara bagian (*state*) dalam upaya menjalin kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang muncul. Bentuk pemerintahan federal-state, yang dianut Australia sebagai jalan tengah mengingat tiap *state* disatu sisi ingin bersatu namun di sisi lain bentuk sentralistik hanya akan mereduksi kedaulatan dari setiap gubernur jendral dinegara bagian dalam mengelola daerahnya, oleh sebab itulah bentuk federal dengan desentralisasinya menjadi penengah, yang mengakomodir kebutuhan negara-negara bagian yang terhimpun dalam satu negara pesemakmuran, dimana New South Wales sebagai pusatnya.

Masyarakat Cosmopolitan sejalan dengan agenda dalam menciptakan kehidupan Australia yang demokratis baik dalam hal politik dan hubungan masyarakatnya. Dimana nilai-nilai pluralisme perlu dipupuk guna menciptakan keahrmonisian dalam hubungan masyarakat dari berbagai bangsa di Australia. Tidak ada parameter yang tepat untuk bisa menentukan keberhasilan keberadaan serta pemberlakuan demokrasi dan demokratisasi yang terjadi di suatu negara secara tepat. Bentuk sistem pemerintahan apapun yang dijalankan dalam suatu negara tersebut, bisa dikategorikan sebagai negara yang memiliki pemerintahan demokratis apabila bisa menampung aspirasi dari masyarakatnya serta membawa ke arah yang lebih baik dengan dukungan masyarakatnya juga. Representasi sistem perlementer yang ada di Australia sudah cukup menggambarkan bentuk demokrasi pada porsi yang tepat. Dimana pada level Ke-Negaraan masing-masing beserta latar belakang sejarah negara dan perkembangannya, masing-masing terdapat juga efisiensi proporsionalitas suatu sistem teruji, karena fakta menunjukkan bahwa keberhasilan dan pengakuan internasional baik melalui sistem politik maupun eksistensi negara itu sendiri. Karena dengan adanya perwakilan rakyat yang dipilih secara sah dan legal yang duduk di kursi pemerintahan.

Kemajemukan juga bisa dilihat dari lahirnya partai-partai di Australia, yang menyuarakan berbagai kepentingan baik berdasarkan kepentingan ekonomi seperti partai liberal, buruh, dan petani, atau juga partai yang mengusung kebangsaan sebagai bentuk

emansipasi posisi mereka di masyarakat seperti partai dari suku aborigin yang merasa termarginalkan dalam pergaulan politik dan sosial, begitu pun partai agama, dan partai lingkungan yang menambah semarak interaksi antar golongan di Australia.

PENUTUP

Simpulan

Terdapat tiga gelombang migrasi yang terjadi di Australia, yakni:

- 1) Gelombang pertama, yang kemudian dikenal sebagai migrasi penduduk asli Australia.
- 2) Gelombang kedua, yang terjadi ketika rombongan pertama Inggris datang ke Australia.
- 3) Gelombang ketiga, yang terjadi pasca perang dunia ke dua.

Dampak dari migrasi tersebut antara lain:

- 1) Masyarakat Australia menjadi masyarakat yang multicultural karena orang-orang yang bermigrasi ke Australia tidak hanya dari Inggris ataupun dari daratan Eropa saja, tetapi ada juga migrasi yang dilakukan oleh orang-orang Asia seperti India dan Cina.
- 2) Masyarakat Australia menjadi masyarakat yang cosmopolitan, yakni Australia adalah pertemuan masyarakat dari berbagai bangsa di dunia.

Terdapat Tiga Cabang Pemerintahan di Australia, yakni Cabang Legislatif (Parlemen - Senat dan Majelis Perwakilan Rendah); Eksekutif (Kementerian dan Pejabat Pemerintah); dan Cabang Yudikatif (sistem peradilan hukum).

Australia memiliki sistem pemerintahan federasi dan state, yaitu:

- 1) Pemerintahan Persemakmuran/Federasi atau Pemerintah Pusat

Tanggung jawab pemerintah federal ini antara lain adalah di bidang:

- a) Pertahanan
- b) Perpajakan
- c) Urusan Luar Negeri
- d) Perdagangan Luar Negeri
- e) Komunikasi
- f) Transportasi
- g) Pendidikan
- h) Pembangunan

- 2) Pemerintah Negara Bagian dan Teritori
Tanggung jawab pemerintah negara bagian (*state*) adalah antara lain di bidang:

- a) Pendidikan
- b) Pembinaan hukum dan ketertiban masyarakat
- c) Pembangunan
- d) Pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup
- e) Jasa
- f) Perumahan Rakyat
- g) Kesehatan
- h) Transportasi lokal

Seperti yang telah diketahui bahwa Australia memiliki masyarakat yang majemuk. Kemajemukan juga bisa dilihat dari lahirnya partai-partai di Australia, yang menyuarakan berbagai kepentingan baik berdasarkan kepentingan ekonomi seperti partai liberal, buruh, dan petani, atau juga partai yang mengusung kebangsaan sebagai bentuk emansipasi posisi mereka di masyarakat seperti partai dari suku aborigin yang merasa termarginalkan dalam pergaulan politik dan sosial, begitu pun partai agama, dan partai lingkungan yang menambah semarak interaksi antar golongan di Australia. Partai Politik merupakan pusat untuk memahami bagaimana politik Australia bekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, John. 1820. *History of Indian Archipelago*, London: Edinburg
- Siboro, J. (1989). *Sejarah Australia*. Bandung: Tarsito.

DAMPAK MIGRASI DI AUSTRALIA
TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DAN PARTAI POLITIK
Agus Budiman

Riwayat Penulis

Agus Budiman, S.Pd. M.Sc., adalah dosen tetap Yayasan Pendidikan Galuh Ciamis. S1 Sarjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Sejarah, S2 Ketahanan Nasional dari Universitas Gajah Mada, SUSCADOSWAR Tahun 2003 LEMHANAS RI.